

## TEORI PERENCANAAN

Materi I : TKW 407 - 3 SKS

Oleh : DR. Ir. Ken Martina K, MT.

# BAB I PENDIDIKAN DAN PROFESI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PLANOLOGI)

## 1.1. Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota

Pendidikan dan profesi perencana wilayah dan kota (*planner*) telah lama diadakan di Indonesia, sejak ITB membuka jurusan ini pada akhir tahun 50 an dan awal tahun 60 an.

Adapun falsafah pendidikan ini adalah adanya kenyataan bahwa dalam tata kehidupan manusia perlu melakukan perencanaan. Dimana dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang saling kait mengait, dan perlu dijaga agar tidak terjadi benturan yang dapat menimbulkan konflik.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 17000 pulau yang membentang dari sabang sampai merauke, dengan berbagai latar belakang budaya, memerlukan perencanaan yang menyatukan berbagai budaya dan kepentingan sehingga membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh. Perkembangan penduduk yang tidak dapat dibendung, demikian pula kemajuan teknologi dan arus globalisasi menuntut adanya perencanaan pembangunan wilayah yang baik yang didukung oleh ahli perencana wilayah dan kota yang memadai. Permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah Indonesia baik pada tingkat lingkungan sekitar sampai level nasional, baik secara kualitatif maupun kuantitatif membutuhkan ahli perencana wilayah dan kota yang mampu menjawab permasalahan tersebut.

Sebagai ahli perencana wilayah dan kota seorang planner harus mampu **melakukan pendekatan** secara menyeluruh, baik perencanaan dalam lingkungan kota (urban) maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu wilayah (regional), dan mencakup segi fisik, sosial, ekonomi, budaya dan bahkan politik.

Seorang ahli perencana wilayah dan kota harus mampu **memberikan penafsiran-penafsiran** untuk masa mendatang, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat, potensi dan kendala yang ada, serta mampu mewujudkannya ke dalam suatu perencanaan. Perencanaan

yang dimaksud adalah perencanaan yang berkait dengan ruang fisik, yang meliputi kota (*urban*) maupun wilayah (*regional*), sebagai hasil analisis dari segi fisik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan – keamanan, bahkan politik, yang bersama-sama mempengaruhi ruang wilayah dan kota.

Mengingat tuntutan terhadap seorang ahli perencana wilayah dan kota terkait dengan perencanaan ruang fisik, maka mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota harus mempunyai kemampuan sebagai berikut<sup>1</sup>:

- a. Pemahaman dan pengenalan serta dapat mengemukakan secara jelas tentang permasalahan pembangunan umumnya dan pembangunan wilayah dan kota khususnya;
- b. Mampu mengartikan serta merumuskan perencanaan dan perancangan serta mampu menyusun proses perencanaan sebagai suatu sistematika dan cara berpikirdi dalam perencanaan dan perancangan;
- c. Mampu dan memahami serta mengenal pengertian skala serta lingkup perencanaan dan perancangan;
- d. Mengetahui dan dapat mengaplikasikan teknik dan model-model perencanaan dan perancangan wilayah dan kota;
- e. Mampu untuk mengenali dan memahami aspek-aspek mekanisme dan aspek pelaksanaan rencana pembangunan, agar supaya rencana yang dibuat lebih efektif.

Berdasarkan pemahaman yang harus dikuasai oleh seorang sarjana perencanaan wilayah dan kota, maka pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota – Universitas Esa Unggul, kurikulum yang diberikan selama 8 (delapan) semester yang terdiri atas 144 SKS adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT (SKS)</b>
Motivasi Usaha	1
Kewarganegaraan	2
Bahasa Indonesia	2
TOEFL I	2
Dasar Perancangan & Rekayasa Teknik	2
Pengantar Ekonomi	3
Perpetaan	3
Studio Dasar I : Gambar Teknik	3
Pengantar Perencanaan Urban dan Regional	3
Matematika Teknik Dasar	3

<sup>1</sup> Materi kuliah PL/102 Jurusan Teknik Planologi – Institut Teknologi Bandung 1990.

<sup>2</sup> Materi kuliah ini memungkinkan ditempuh oleh mahasiswa dalam 7 semester, apabila mahasiswa mengikuti kuliah semester pendek untuk beberapa mata kuliah yang diajarkan dan lulus.

<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT (SKS)</b>
TOEFL 2	2
Kalkulus Terapan	2
Studio Dasar 2 : Proses Perencanaan	3
Ekologi dan Analisis Sumberdaya Alam	3
Ekonomi Urban dan Regional	3
Analisis Lokasi dan Pola Keruangan	3
Infrastruktur Urban dan Regional I	2
Teori Perencanaan	3
Aplikasi Komputer u/ Perencanaan	2
Pengantar Sistem Sosial	2
Pengantar Geologi	2
Business English	2
Pengantar Kependudukan	2
Teori Perencanaan Urban	2
Infrastruktur Urban dan Regional 2	2
Perencanaan Tata Guna Lahan	2
Statistika Dasar	2
Sistem Informasi Geografis	3
Studio Perencanaan dan Desain Pengembangan I : Perencanaan Tapak	3
Statistika Terapan	2
<b>Teori Urban Design</b>	2
Sistem Perumahan	3
Metoda Analisis Perencanaan I	2
Metodologi Penelitian	2
<b>Studio Perencanaan dan Desain Pengembangan II : Pengembangan Kawasan</b>	4
Hukum Perencanaan	2
Perencanaan Transport	3
Agama	2
Komunikasi Profesional	2
Mata Kuliah Pilihan I	2
Studio Perencanaan dan Desain Pengembangan III : Komponen A	2
Studio Perencanaan dan Desain Pengembangan III : Komponen B	3
Teori Perencanaan Regional	3
Metoda Analisis Perencanaan 2	2
Pembiayaan Pembangunan	2
Sistem Informasi berbasis Komputer	2

<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT (SKS)</b>
Mata Kuliah Pilihan II	2
Mata Kuliah Pilihan III	2
Studio Perencanaan dan Desain Pengembangan IV : Komponen A	2
Studio Perencanaan dan Desain Pengembangan IV : Komponen B	3
Manajemen Operasional	3
Manajemen Perkotaan	2
Isu-isu Perencanaan Kontemporee	2
Teknik Evaluasi Perencanaan	2
Mata Kuliah Pilihan IV	2
Mata Kuliah Pilihan V	2
Seminar Perencanaan	2
Kerja Praktek	3
Kewirausahaan	2
Tugas Akhir	6
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>

## **1.2. Profesi Perencana Wilayah dan Kota**

Seorang sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dapat bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang relevan. Di tingkat Pemerintah (pusat) seperti misalnya pada kementerian koordinator, kementerian, badan koordinasi seperti di bawah ini:

### **Kementerian Koordinator:**

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
3. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

### **Kementerian:**

4. Kementerian Agama
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
9. Kementerian Kehutanan
10. Kementerian Kesehatan
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Kelautan Dan Perikanan
13. Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
14. Kementerian Komunikasi Dan Informatika

15. Kementerian Pekerjaan Umum
16. Kementerian Perhubungan
17. Kementerian Pendidikan Nasional
18. Kementerian Perdagangan
19. Kementerian Pertanian
20. Kementerian Pertahanan
21. Kementerian Perindustrian
22. Kementerian Sosial
23. Kementerian Perumahan Rakyat
24. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

### **Kementerian Negara**

25. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
26. Kementerian Negara Koperasi Dan UKM
27. Kementerian Negara Lingkungan Hidup
28. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
29. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
30. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
31. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
32. Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga
33. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
34. Kementerian Negara Riset Dan Teknologi

### **Lembaga Setingkat Menteri**

35. Sekretariat Negara
36. Sekretariat Kabinet
37. Bank Indonesia

### **Badan Koordinasi**

38. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
39. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
40. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
41. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
42. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
43. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
44. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
45. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
46. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
47. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
48. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
49. Badan Pusat Statistik (BPS)
50. Badan SAR Nasional (Basarnas)

51. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
52. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
53. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
54. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
55. Badan Koordinasi Penanaman Modal / The Investment Coordinating Board
56. Badan Pengembangan Ekspor Nasional / National Agency for Export Development
57. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan / Environmental Impact Management Agency
58. Badan Pengawasan dan Penanaman Modal (BAPEPAM)
59. Badan Urusan Logistik (BULOG)
60. Lembaga Informasi Nasional (LIN)
61. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Untuk tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi), seorang planner dapat bekerja misalnya pada:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Perhubungan
- Dinas Pariwisata
- Dinas Kehutanan
- Dinas Perindustrian & Perdagangan
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Pertanian
- Dan lain-lain

Untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten: Bappeda dan dinas seperti pada tingkat provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Institut Teknologi Bandung, *"Materi Kuliah PL/102"*, Bandung, 1990.
2. **Glasson, John.** *"An Introduction to Regional Planning"*, Hutchinson and Co Publisher Ltd, London, 1974.
3. Djoko Sujarto., *"Beberapa Pengertian Perencanaan Fisik"*.